



EDISI SELASA 09 JUNI 2026

H A R I A N

# LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

**02** GOVERNMENTTODAY  
MinyaKita Tak Lagi Masuk Bantuan Pangan,  
Distribusi Penuh ke Pasar**05** NUSANTARA  
Rupiah Tembus Rp18.200/Dolar AS, Inflasi hingga  
PHK Mengintai**10** LISTSTYLE  
Toner dan Essence Sering Dianggap Sama,  
Padahal Fungsinya Berbeda

## Gempa M 7,8 Bikin Filipina Porak-poranda

Petugas penyelamat memeriksa kerusakan bangunan pascagempa bumi bermagnitudo 7,8 yang mengguncang wilayah selatan Filipina di Kota General Santos, Senin (8/6/2026). Gempa kuat yang berpusat di lepas pantai Pulau Mindanao tersebut memicu peringatan tsunami di sejumlah negara kawasan Pasifik, termasuk Indonesia, serta menyebabkan kerusakan luas pada bangunan, fasilitas umum, sekolah, pusat perbelanjaan, hingga bandara. Otoritas Filipina melaporkan sedikitnya 31 orang tewas dan 134 lainnya luka-luka akibat bencana tersebut. Selain korban jiwa, ribuan warga juga sempat dievakuasi ke lokasi yang lebih aman menyusul ancaman tsunami dan rentetan gempa susulan yang terus terjadi setelah guncangan utama. Berita lengkap baca Hal.7.(Philippine Red Cross via AP.)

## PROFIL PIMPINAN BARU BADAN GIZI NASIONAL (BGN)

### MAYJEN TNI TRENGGONO

Wakil Kepala BGN

- Lahir 21 November 1969
- Lulusan Akademi Militer 1993 (Infanteri/Kopassus)
- Perwira tinggi TNI AD
- Pernah menjabat Dandim 0704/Banjarnegar Danmantar Akmil
- Kepala Departemen Ilmu Dasar Militer Akmi Danrindam V/Brawijaya
- Direktur Umum Akademi Militer (2023)
- Staf Khusus Panglima TNI (2025)
- Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (2025)
- Pensiun dini dari TNI setelah ditunjuk menjadi Wakil Kepala BGN

### NANIK SUDARYATI DEYANG

Kepala BGN

- Lahir di Madiun, Jawa Timur, 3 Januari 196
- Jurnalis senior, pernah berkarier di Tabloid Bangkit dan Kelompok Media Peluang
- Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019
- Wakil I BP Taskin (2024-2029)
- Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi (2025-2026)
- Dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana

### AGUSTINA ARUMSARI

Wakil Kepala BGN

- Ekonom dan auditor senior pemerintahan
- Lulusan D3 dan D4 STAN
- Karier dimulai sebagai auditor BPKP Sumatera Barat
- Direktur Investigasi BUMN/BUMD BPKP (2017)
- Direktur Investigasi III BPKP (2019)
- Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020)
- Wakil Kepala BPKP (2025-2026)
- Dilantik sebagai Wakil Kepala BGN pada 2 Juni 2026



## SIMPANG SIUR DAPUR GIZI TAK 'NGEBUL' LAGI

Beberapa hari lalu, kabar sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti beroperasi dibantah dan disebut tidak mencerminkan kondisi program secara keseluruhan. Namun bantahan itu segera berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Sejak Senin (8/6/2026), berbagai akun media sosial milik pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur mengunggah pemberitahuan penghentian sementara layanan karena dana operasional belum cair. Pada hari yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengakui adanya keterlambatan pencairan anggaran. Di tengah ambisi besar memberi makan jutaan penerima manfaat setiap hari, persoalan justru muncul dari dapur-dapur yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program. Dampaknya menjalar ke berbagai daerah. Sebanyak 195 SPPG di Nusa Tenggara Barat menghentikan operasional sementara. Di Solo, 20 SPPG juga sempat berhenti melayani penerima manfaat. Laporan serupa muncul dari Bangkalan, Magelang, Batam, Cirebon, hingga Banda Aceh. Bagi para pengelola dapur, masalahnya sederhana. Saat dana belum masuk ke rekening operasional, bahan baku sulit dibeli dan produksi makanan terhenti. Padahal aturan BGN mewajibkan operasional menggunakan dana resmi program. Artinya pemilik dapur tak boleh menalangi kebutuhan harian dari dana pribadi. BGN menegaskan program MBG tidak dihentikan. Untuk mengatasi gangguan di lapangan, BGN mempercepat proses top-up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) dengan skala prioritas. Dapur-dapur yang saldo rekening virtualnya telah menipis, terutama yang tersisa di bawah Rp150 juta, menjadi kelompok yang didahulukan menerima tambahan dana agar operasional kembali berjalan normal. Namun terhentinya dapur dalam waktu hampir bersamaan menjadi titik ujian program ini. Apakah dapur-dapur di lapangan tetap bisa mengepul setiap hari untuk memenuhi gizi? BACA HAL 11...

# MINYAKITA TAK LAGI MASUK BANTUAN PANGAN, DISTRIBUSI PENUH KE PASAR

Pemerintah memutuskan tidak lagi menggunakan MinyaKita sebagai bagian dari program Bantuan Pangan (Banpang). Kebijakan ini diharapkan membuat minyak goreng rakyat tersebut lebih mudah diperoleh masyarakat di pasar dan membantu menjaga ketersediaan pasokan.

**M**enteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan seluruh pasokan MinyaKita ke depan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar rakyat, bukan lagi disalurkan melalui paket bantuan pemerintah.

“Jadi sekarang tidak ada lagi MinyaKita untuk Bantuan Pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan MinyaKita,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menegaskan MinyaKita bukan merupakan minyak goreng yang memperoleh subsidi langsung dari pemerintah. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap MinyaKita sebagai produk subsidi, padahal statusnya berbeda.

Ia menjelaskan bahwa MinyaKita merupakan merek yang dikelola pemerintah dan diproduksi melalui skema kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) bagi eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO).



Ilustrasi-Pemerintah berencana menaikkan HET MinyaKita (ANTARA)

“Ketika perusahaan mau ekspor, maka harus DMO dulu, harus menyediakan MinyaKita,” ujarnya.

Politikus PAN itu juga mengungkapkan bahwa program Bantuan Pangan ke depan dapat menggunakan komoditas lain yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi pasar. Salah satu yang dipertimbangkan adalah telur ayam ras, terutama ketika harganya sedang mengalami penurunan.

“Bantuan pangan pun bisa juga nanti bervariasi. Misalnya telur lagi turun, bisa saja untuk bantuan pangan,” tutur Budi.

Berikut parafrase naskah berita dengan gaya mengalir dan tetap memuat seluruh data serta kutipan penting:

Sejumlah pedagang bahan pokok di pasar tradisional Surabaya mengeluhkan terbatasnya pasokan MinyaKita di tengah tingginya

## Lini masa perubahan HET Minyakita dari waktu ke waktu:

- **Juli 2022 (Awal Peluncuran)**  
Rp14.000 per literMinyakita pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Perdagangan saat itu, Zulkifli Hasan, pada 6 Juli 2022 dengan harga resmi Rp14.000 per liter. Kebijakan ini diambil sebagai solusi atas krisis dan lonjakan harga minyak goreng curah di pasaran.
- **Agustus 2024**  
Rp15.700 per literSetelah bertahan selama lebih dari dua tahun, pemerintah resmi menaikkan HET Minyakita menjadi Rp15.700 per liter mulai 14 Agustus 2024. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian biaya komponen produksi dan rantai distribusi yang kian meningkat.
- **Juni 2026 (Rencana Penyesuaian Baru)**  
Masih dalam pembahasankementerian Perdagangan bersama kementerian terkait telah menyepakati rencana kenaikan HET Minyakita terbaru. Penyesuaian ini terpaksa dilakukan karena meroketnya harga bahan baku Crude Palm Oil (CPO) dunia yang sempat menyentuh angka rata-rata Rp15.445 per kg, membuat produsen kesulitan menjual di hargaHET lama. Angka resmi untuk HET baru ini dijadwalkan akan diumumkan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan setelah tren fluktuasi harga CPO kembali stabil



## HET Dinaikkan, Pemerintah Tunggu Stabilitas Harga CPO

**PEMERINTAH** berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita setelah menilai harga bahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jawa Timur, Yudi Arianto, mengatakan keputusan penyesuaian HET masih menunggu penetapan resmi pemerintah pusat. Menurutnya, rencana tersebut telah melalui berbagai evaluasi dan pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait.

“Tentu saja keputusan itu tidak tiba-tiba tapi melalui berbagai evaluasi, berbagai pertemuan dengan stakeholder terkait. Jadi posisi kita masih menunggu (informasi pemerintah pusat),” ujar Yudi, Senin (8/6/2026).

Saat ini HET MinyaKita masih dipatok Rp15.700 per liter.

Sementara itu, harga rata-rata CPO telah mencapai sekitar Rp15.445 per kilogram, jauh lebih tinggi dibanding saat HET ditetapkan ketika harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram.

Menurut Yudi, kondisi tersebut membuat produsen kesulitan menutup biaya produksi karena selisih antara harga bahan baku dan harga jual semakin tipis.

“Jadi dulu ditentukan (HET) Rp15.700 kan karena harga CPO-nya apa namanya Rp12.400 toh. Sekarang ketika harga CPO-nya sudah Rp15.000 ke HET-nya Rp15.700 kan tidak angkat ya, enggak nutup sehingga diperlukan penyesuaian,” jelasnya.

Senada dengan itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah telah menyepakati kenaikan HET MinyaKita dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Namun, besaran kenaikan belum ditentukan karena

pemerintah masih mencermati perkembangan harga CPO.

“Menindaklanjuti rapat sebelumnya di kantor Kemenko Pangan, jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk MinyaKita,” kata Budi.

Ia menjelaskan harga CPO sempat menyentuh rata-rata Rp15.445 per kilogram sebelum kembali turun ke kisaran Rp14.000 per kilogram.

“Tapi kemarin sempat turun lagi menjadi Rp14.000 sekian (per kg), dan kemarin harga TBS sudah sempat turun, tapi sekarang sudah mulai naik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan pembahasan mengenai HET baru MinyaKita masih akan dikoordinasikan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.(tin,ist/dya)

permintaan masyarakat. Mereka berharap pemerintah segera menambah distribusi minyak goreng rakyat tersebut agar stok di pasaran kembali stabil.

Salah seorang pedagang di Pasar Wonokromo, Munawaroh, mengaku sudah cukup lama kesulitan mendapatkan pasokan MinyaKita.

“Stok MinyaKita sudah lama kosong, ada paling dua bulanan,”\* kata Munawaroh, Senin (8/6/2026).

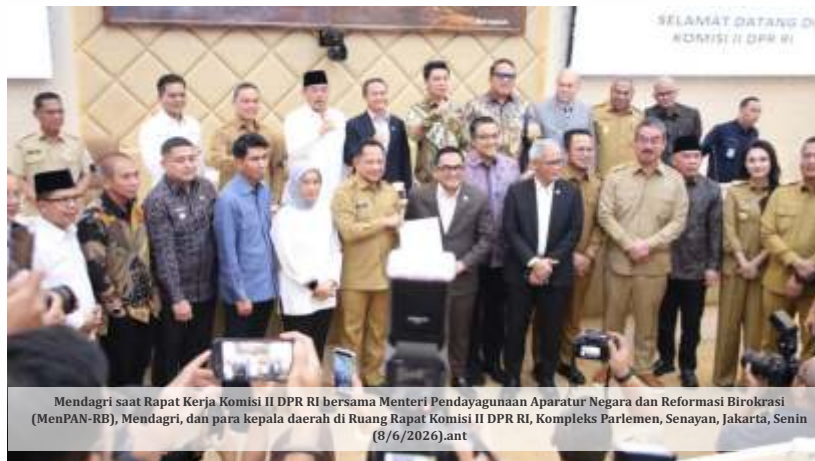
Keluhan itu mencuat saat Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Surabaya melakukan pemantauan ke Pasar Sopyono dan Pasar Wonokromo pada Minggu (7/6/2026).

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Lenggeng Wisnu, membenarkan bahwa sejumlah pedagang meminta adanya tambahan distribusi MinyaKita. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap produk tersebut masih cukup tinggi. (wid,rls,kum/dya)

# DI DEPAN DPR MENTERI TITO MINTA PEMDA SETOP REKRUT HONORER BARU

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru di tengah tingginya beban belanja pegawai daerah. Langkah itu dinilai penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semakin terbebani, terutama menjelang penerapan penuh ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD pada 2027.

**D**alam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Tito mengungkapkan bahwa saat ini hanya 67 daerah yang memiliki porsi belanja pegawai di bawah 30 persen APBD. Rinciannya terdiri atas 17 provinsi, 48 kabupaten, dan dua kota.



Mendagri saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Mendagri, dan para kepala daerah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).ant

“Artinya dominan sudah di atas 30 persen,” kata Tito.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk mencegah kenaikan belanja pegawai. Opsi yang tersedia adalah mengurangi jumlah pegawai atau menahan penambahan pegawai baru, terutama tenaga honorer yang saat ini sudah dimoratorium.

“Opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan

pemerintah tidak menghendaki pemberhentian pegawai yang sudah ada, baik PPPK maupun tenaga honorer. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, ia menekankan bahwa langkah penataan kepegawaian tidak boleh menimbulkan keresahan di kalangan aparatur.

“Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai,” kata Tito.

Ia menambahkan, tenaga kerja yang sudah direkrut sebaiknya tetap dipertahankan. Karena itu, solusi yang didorong pemerintah adalah menghentikan perekrutan baru sambil memperbaiki struktur belanja daerah.

“(Kepala daerah) harus tegas tidak ada perekrutan honorer baru,” tegasnya.

Tito mengakui bahwa kebutuhan tenaga kerja pada sektor pelayanan publik tertentu, seperti guru dan tenaga kesehatan, masih sangat diperlukan masyarakat. Namun ia menyoroti banyaknya tenaga honorer administrasi yang direkrut tanpa kompetensi memadai.

“Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu menumpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah,” katanya.

Menurut Tito, akumulasi tenaga honorer dari waktu ke waktu kemudian memunculkan tuntutan agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setelah status mereka berubah menjadi PPPK, beban pembiayaannya harus ditanggung APBD. “Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu. Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menjelaskan bahwa persoalan belanja pegawai berkaitan erat dengan amanat Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Aturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai, di luar tunjangan guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. (wid,ist,rls/dya)

## PERKEMBANGAN DANA TRANSFER KE DAERAH

2026\*\*

■ **Rp 813.0 Triliun**  
■ **35.2 Persen**

2025\*

■ **Rp 848.5 Triliun**  
■ **23.5 Persen**

2024

■ **Rp 857.6 Triliun**  
■ **25.8 Persen**

2023

■ **Rp 825.4 Triliun**  
■ **26.4 Persen**

2023

■ **Rp 816.2 Triliun**  
■ **26.4 Persen**

■ Dana Transfer ke Daerah  
■ Persentase Terhadap Belanja Negara

\*\*RAPBN 2026 \*APBN 2025

**GUBERNUR** Rudy Mas'ud mengungkapkan semakin beratnya beban fiskal daerah akibat pe-nurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) di tengah kewajiban pemerintah daerah membayar gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga honorer. Kondisi tersebut, menurutnya, mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB di Kompleks Parlemen, Senayan,

## Curhat Gubernur Kaltim soal Beratnya Biaya Gaji PPPK

Jakarta, Senin (8/6/2026), Rudy mengatakan pemerintah daerah kini menghadapi tekanan besar karena harus menanggung sendiri kebutuhan belanja pegawai di tengah berkurangnya transfer dari pusat.

“Beban fiskal gaji PPPK ini. Kapasitas belanja daerah semakin berat karena kewajiban daerah menanggung mandiri pemenuhan gaji dan tunjangan PPPK di tengah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer keuangan daerah,” kata Rudy.

Meski demikian, ia menyebut posisi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah ambang batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Berkaitan dengan belanja daerah hari ini, untuk Kalimantan Timur kami masih di angka 24,01 persen. Kami mencatat tadi yang

disampaikan dengan Bapak Mendagri bahwa ada 17 provinsi yang masih di bawah 30 persen dan masih ada 21 provinsi yang di atas 30 persen,” ujarnya.

Rudy menambahkan, persoalan belanja pegawai jauh lebih berat di tingkat kabupaten dan kota. Dari data yang dipaparkan dalam rapat, hanya sekitar 48 kabupaten/kota yang masih memiliki rasio belanja pegawai di bawah 30 persen APBD.

“Begitu juga dengan berkaitan dengan kabupaten/kota. Kabupaten/kota masih banyak sekali. Kalau saya tidak salah tadi mencatatnya lebih kurang sekitar 48 yang di bawah daripada 30 persen, sisanya masih di atas daripada itu,” katanya.

Secara khusus, Rudy menyampaikan sejumlah catatan terkait pengelolaan PPPK. Salah satunya adalah belum adanya regulasi yang mengatur peningkatan kompetensi PPPK melalui pendidikan lanjutan. (wid,ist/dya)

# BBM SUBSIDI NELAYAN KINI DIPERKETAT, KAPAL TANPA IZIN TAK BISA LAGI DAPAT REKOMENDASI

**PACITAN** — Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Sektor Perikanan pada Selasa, 26 Mei 2026 bertempat di Gedung Grhatama Jaladri, UPT PPP Tamperan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Nanang Hardiwijono, S.Sos., M.Si., beserta Kepala UPT PPP Tamperan, Jadmika Sufiadi, S.Pi., M.AP., serta para Kepala Seksi di lingkungan UPT PPP Tamperan dan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Selain itu, kegiatan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh KSOP Tanjung Pakis serta Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Blitar di Madiun.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan terkait pengetatan aturan penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi jenis Peralite bagi sektor perikanan. Berdasarkan ketentuan terbaru, rekomendasi BBM subsidi hanya dapat diberikan kepada kapal perikanan di bawah 5 GT yang telah memiliki legalitas dan izin resmi, seperti PAS Kecil serta terdaftar sebagai anggota Kelompok Usaha



Bersama (KUB).

Selain memiliki hak untuk mendapatkan subsidi BBM, nelayan juga memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen legalitas usaha dan kapal. Dokumen yang wajib dimiliki antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), PAS Kecil, serta Buku Perikanan Kapal Penangkap (PKP).

Dalam sesi diskusi, Ketua KUB Sidoharjo, Mas Efendi, turut menyampaikan beberapa masukan dan kendala yang dialami nelayan di lapangan. Di antaranya terkait kuota BBM yang belum sepenuhnya digunakan namun sudah habis dalam sistem, serta harapan agar proses pengurusan dokumen perizinan nelayan dapat lebih dipercepat sehingga pelayanan kepada nelayan menjadi lebih optimal.

Selain sosialisasi BBM subsidi, UPT PPP Tamperan juga memberikan materi Diskusi dan Sosialisasi Penataan Kolam Labuh dan Perizinan Kapal yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis UPT PPP Tamperan, Edi Rukyanto, bersama Plt. Kepala Tata Usaha UPT PPP Tamperan,

Arrazi Rustam.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya over capacity di area pelabuhan, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan, meningkatkan produktivitas pendaratan ikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nelayan.

Selain itu, penataan kolam labuh juga diharapkan mampu mewujudkan penggunaan area pelabuhan yang tertib, aman, dan efisien, sekaligus mendukung legalitas, tertib administrasi, serta pengendalian operasional kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa proses pengurusan PAS Kecil telah menggunakan aplikasi E-PAS Kecil. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan administrasi, meningkatkan keakuratan data, serta menghindari risiko kehilangan dokumen.

Sebagai bentuk komitmen

pelayanan kepada nelayan, Kepala KSOP Tanjung Pakis, Bapak Setya, menyampaikan dukungannya dalam percepatan proses pengurusan dokumen PAS Kecil bagi nelayan di Pacitan. Beliau juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah menangani pengurusan PAS Kecil nelayan Pacitan sejak tahun 2015, sehingga diharapkan proses pelayanan dan koordinasi dapat berjalan lebih optimal.

Dalam kesempatan ini, petugas dari Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan UPT PPP Tamperan juga melaksanakan pendataan nelayan kecil, jumlah kapal, serta data produksi perikanan. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat basis data sektor perikanan sekaligus mendukung ketepatan pelayanan dan penyaluran program kepada nelayan.

Melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini, diharapkan para nelayan dapat lebih memahami pentingnya kelengkapan administrasi dan legalitas kapal, sekaligus menjadi wadah penyampaian aspirasi demi terciptanya penyaluran BBM subsidi yang lebih tertib, tepat sasaran, dan mendukung pengelolaan pelabuhan yang lebih optimal. (adv)



## Resmi Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Cegah PHK

**JAKARTA**-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (8/6/2026) pukul 16.30 WIB.

Pengangkatan Said Iqbal ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Dalam prosesi yang dipimpin

langsung Presiden Prabowo, Said Iqbal dilantik bersamaan dengan sejumlah pejabat baru lainnya, yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, serta Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Dalam pengambilan sumpah jabatan, Said Iqbal bersama para pejabat lainnya mengucapkan sumpah yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Mereka menyatakan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berjanji menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan

dengan sebaik-baiknya.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat yang dilantik.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat baru menandatangani

berita acara pelantikan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Said Iqbal dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan buruh nasional melalui KSPI. Sebelum aktif di dunia politik, ia lama berkecimpung dalam perjuangan serikat pekerja. Pada Pemilu 2009, ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui Partai Keadilan Sejahtera. Pada 2021, ia terpilih sebagai Presiden Partai Buruh. (tin.ist,rla/dya)

**PENDAPATAN NEGARA  
(S.D. 31 MEI 2026)**

**TOTAL ASET  
Rp 1.185,0 T**  
(37,6% terhadap APBN)

**Penerimaan Pajak  
Rp 834,4 T**

**Penerimaan Kepabeanan & Cukai  
Rp 123,8 T**

**PNBP  
Rp 226,4 T**

**BELANJA NEGARA  
(S.D. 31 MEI 2026)**

**TOTAL ASET  
Rp 1.365,4 T**  
(35,5% terhadap APBN)

**Belanja Pemerintah Pusat  
Rp 1.059,3 T**

**Transfer ke Daerah  
Rp 306,1 T**



**RUPIAH TEMBUS Rp18.200/DOLAR AS,  
INFLASI HINGGA PHK MENGINTAI**

Nilai tukar rupiah terus berada di bawah tekanan pada perdagangan Senin (8/6/2026). Di pasar spot, mata uang Garuda terdepresiasi 165 poin atau 0,91 persen ke level Rp18.201 per dolar Amerika Serikat (AS) hingga pukul 13.48 WIB. Sejak pembukaan perdagangan, rupiah memang bergerak melemah. Bahkan, sebelumnya sempat berada di posisi Rp18.170 per dolar AS atau terkoreksi 134 poin dibandingkan penutupan sebelumnya.

**P**residen Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjandra, menilai pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor riil. Menurut dia, depresiasi nilai tukar dapat memicu kenaikan harga barang

konsumsi dan biaya produksi yang pada akhirnya mendorong inflasi.

“Pelemahan rupiah ke dalam negeri berimbas ke kenaikan harga konsumsi dan produksi atau inflasi, penurunan daya beli, beban utang dolar AS meningkat, potensi PHK. Jadi itu yang dijaga,” kata Ariston.

Ia menjelaskan, kenaikan harga barang dan jasa akibat melemahnya rupiah berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Selain itu, perusahaan yang memiliki kewajiban dalam mata uang dolar AS juga akan menghadapi peningkatan beban utang. Jika tekanan ekonomi

berlangsung dalam waktu lama, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) pun dapat meningkat.

Ariston menegaskan kondisi pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal. Menurutnya, depresiasi yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas.

“Kondisi pelemahan rupiah ini tidak diterima oleh banyak orang, jadi saya rasa pemerintah tidak menganggap ini normal,” ujarnya.

Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS masih menjadi faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Situasi semakin diperburuk oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.

Menurut Ariston, tekanan tersebut tidak hanya dialami Indonesia. Sejumlah mata uang lain juga mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

“Pelemahan rupiah saat ini adalah bauran faktor eksternal dan internal. Saat ini pengaruh faktor eksternal ini cukup kuat karena tidak hanya rupiah yang melemah terhadap dolar AS, nilai tukar lain pun melemah,” katanya.

Meski demikian, faktor domestik dinilai turut memperbesar tekanan terhadap rupiah. Salah satunya adalah keluarnya investor asing dari pasar saham Indonesia, termasuk akibat penyesuaian indeks global oleh MSCI yang memengaruhi arus modal. (wid,ist/dya)

**Menkeu Akui Beban Subsidi Bengkak 208,2 Persen**

**PELEMAHAN** nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga Mei 2026 melonjak 208,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilainya mencapai Rp203,7 triliun, terdiri dari subsidi sebesar Rp94,8 triliun dan kompensasi Rp108,9 triliun.

“Subsidinya Rp94,8 triliun, kompensasinya Rp108,9 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026.

Lonjakan tersebut antara lain dipicu perubahan skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Pertamina. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan menjelang akhir tahun, kini pemerintah

menyalurkan sekitar 70 persen kompensasi setiap bulan untuk menjaga likuiditas perusahaan pelat merah tersebut.

“Kalau tahun lalu di akhir tahun, kalau sekarang sudah mulai 70 persen di setiap bulan. Nanti September kita hitung semuanya, kita bayar yang 30 persen,” ujar Purbaya.

Menurut dia, kebijakan tersebut membuat arus kas Pertamina lebih terjaga di tengah lonjakan harga energi dan pelemahan rupiah.

Perhitungan subsidi dan kompensasi dilakukan menggunakan asumsi nilai tukar rata-rata Rp17.057 per dolar AS secara year to date. Pada saat yang sama, harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga akhir Mei mencapai 91,9 dolar AS per barel.

Dari sisi konsumsi energi, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga Mei tercatat mencapai 6,31 juta kiloliter atau meningkat 8,6 persen dibandingkan tahun lalu. Penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 2,85 juta

ton, naik 2,7 persen secara tahunan.

Kenaikan juga terjadi pada konsumsi listrik bersubsidi yang menjangkau sekitar 43 juta pelanggan. Sementara subsidi pupuk telah tersalurkan sebanyak 3,7 juta ton atau meningkat 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski rupiah terus melemah dan harga minyak dunia meningkat akibat ketegangan geopolitik global, Purbaya menegaskan pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah asumsi dasar APBN 2026.

“Subsidi energi kan sudah kita hitung secara signifikan,” katanya.

Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan berbagai skenario risiko dalam penyusunan APBN, termasuk asumsi harga minyak dunia yang bisa mencapai 100 dolar AS per barel serta nilai tukar rupiah yang lebih lemah dibandingkan asumsi awal APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. (wid,ist/dya)

## Antisipasi Tanaman Rusak saat 'Bediding', Pemkot Batu Maksimalkan 42 Green House

**BATU** - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memaksimalkan pemanfaatan 42 green house yang tersebar di sejumlah kelompok tani. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi fenomena bediding atau suhu dingin saat musim kemarau.

"Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi tanaman sayuran, buah, dan bunga hias dari ancaman suhu dingin ekstrem serta embun es yang berpotensi me-nurunkan produktivitas hingga me-nyebabkan kerusakan tanaman," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Hendry Suseno, Senin (8/6/2026).

Dikatakannya, keberadaan green house menjadi salah satu solusi efektif untuk menjaga produk-tivitas pertanian, terutama komoditas sayuran dan bunga hias yang menjadi andalan daerah tersebut.

"Karena kami punya banyak green house yang telah diperbantukan kepada kelompok tani. Itu bisa digunakan karena lebih aman, suhu dan kondisi tanaman bisa dikontrol," katanya.

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Timur sebelumnya telah mengingatkan adanya potensi fenomena bediding di kawasan dataran tinggi. Kondisi tersebut dapat memicu terbentuknya embun es yang berisiko merusak tanaman pertanian, khususnya sayuran, buah, dan bunga.

Berdasarkan data DPKP Kota Batu, saat ini terdapat 42 unit green house yang telah dibangun dan diserahkan kepada kelompok tani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 unit telah dimanfaatkan, sementara empat lainnya masih belum digunakan secara optimal.

Menurut Hendry, pemanfaatan green house menjadi penting mengingat sektor pertanian hortikultura merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Kota Batu.

Data DPKP Kota Batu mencatat, pada triwulan pertama tahun 2026, komoditas petsai atau sawi menjadi penyumbang hasil panen terbesar dengan produksi mencapai 28.790,73

kuintal. Disusul wortel sebanyak 22.705,39 kuintal dan kentang sebesar 21.427,56 kuintal.

Selain itu, produksi bawang daun tercatat mencapai 16.015,17 kuintal, kembang kol 15.554,52 kuintal, kubis 11.569,95 kuintal, serta bawang merah sebanyak 6.391,30 kuintal.

Sementara untuk sektor florikultura, Kota Batu menghasilkan 10.065,50 kuintal bunga mawar, 2.348,75 kuintal bunga krisan, serta 155,50 kuintal anggrek pot selama periode yang sama.

Di sisi lain, DPKP Kota Batu juga meningkatkan kewaspadaan petani terhadap potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya muncul saat terjadi perubahan musim.



Ilustrasi: Sejumlah petani memanen apel di Kota Batu. (foto: Prokopim Kota Batu)

Koordinasi rutin dilakukan bersama penyuluh pertanian dan tenaga pendamping di tingkat desa maupun kelurahan.

Melalui jaringan penyuluh tersebut, informasi terkait perubahan cuaca dan langkah mitigasi dampak bediding terus disosialisasikan kepada sekitar 290 kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batu. (Santi/Dya)

## Hingga Triwulan II

## Opsen Balik Nama Kendaraan Kota Malang Masih Seret

(8/6/2026).

Dijelaskannya, salah satu faktor yang me-mengarui rendahnya realisasi BBNKB adalah masih banyaknya kendaraan bermotor yang telah berpindah kepemilikan melalui transaksi jual beli, namun belum dilakukan proses balik nama oleh pemilik

baru.

Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan dari bea balik nama kendaraan belum dapat dimaksimalkan. Karena itu, menurutnya Bapenda bersama Samsat Malang Kota terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kepemilikan kendaraan secara tepat waktu.

Upaya yang dilakukan antara lain, melalui kerja sama dalam penyampaian pemberitahuan kepada

wajib pajak, termasuk penyampaian informasi langsung ke lokasi-lokasi yang teridentifikasi memiliki kendaraan yang belum melakukan proses balik nama.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan dukungan digitalisasi melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aplikasi tersebut memungkinkan pelacakan dan pelaporan data kendaraan secara lebih rinci, termasuk terkait lokasi kendaraan yang telah berpindah kepemilikan.

"Melalui aplikasi SIAP, informasi terkait kendaraan yang sudah dijual dapat diketahui secara lebih detail, sehingga membantu proses pendataan dan tindak lanjut administrasi," jelasnya.

Berbeda dengan BBNKB, Sulthon menyebutkan realisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada triwulan II tahun 2026 justru telah mendekati target per triwulan.

Menurutnya, dengan target yang

ditetapkan sebesar Rp132 miliar, hingga memasuki triwulan kedua tahun ini, realisasi opsen PKB telah mencapai 39,3 persen dari target 40 persen.

Di sisi lain, Bapenda Kota Malang juga tengah gencar melakukan sosialisasi terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur tindak lanjut penetapan besaran opsen PKB dan BBNKB.

Sulthon menerangkan, regulasi tersebut pada prinsipnya membuka ruang adanya penyesuaian atau kenaikan besaran PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan insentif fiskal yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur.

Menurutnya, pemberian insentif fiskal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak terbebani kenaikan pajak kendaraan pada tahun 2026, meskipun terdapat perubahan ketentuan dalam regulasi nasional. (Santi/Dya)



Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moh. Sulthon. (Santi/Lentera)

**MALANG**- Realisasi opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Malang masih seret di angka 33 persen hingga Triwulan II Tahun 2026. Capaian tersebut belum mampu memenuhi target sebesar 40 persen yang telah ditetapkan.

"Untuk bea balik nama kendaraan, target penerimaan opsen BBNKB mencapai Rp60,5 miliar. Kemudian dari target triwulan kedua sebesar 40 persen, saat ini baru terealisasi sekitar 33 persen. Ini yang masih perlu kami dorong," ujar Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moh. Sulthon, Senin

**KRONOLOGI KEJADIAN  
(8 JUNI 2026)**

**06.37.42 WIB**

- Gempa tektonik M7,7 mengguncang Pantai Selatan Mindanao, Filipina
- Episenter berada di laut pada koordinat 5,80° LU - 125,14° BT, sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara.
- Kedalaman gempa 47 km.

**06.40.44 WIB**

- BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami pertama.

**06.52.26 WIB**

- BMKG memperbarui peringatan dini tsunami dengan parameter gempa tetap M7,7.

**08.13.41 WIB**

- Tsunami mulai terdeteksi di sejumlah tide gauge:
  - Loloda, Maluku Utara: 0,09 m
  - Ulu Siau: 0,18 m
  - Melonguane: 0,32 m

**08.34.52 WIB**

- Tsunami terdeteksi di wilayah lain:
  - Tahuna: 0,30 m
  - Paleleh: 0,45 m
  - Tanjung Sidupa: 0,32 m
  - Bitung: 0,29 m
  - Ternate: 0,14 m
  - Talengan: 0,75 m (tertinggi)

**10.15.51 WIB**

- BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami setelah tidak ditemukan kenaikan muka air laut yang membahayakan.



# FILIPINA DIGUNCANG GEMPA M 7,8, KAWASAN PASIFIK SIAGA

Jumlah korban akibat gempa bumi bermagnitudo 7,8 yang mengguncang wilayah selatan Filipina terus meningkat. Hingga Senin (8/6/2026) sore, otoritas penanggulangan bencana nasional Filipina mencatat sedikitnya 31 orang meninggal dunia dan 134 lainnya mengalami luka-luka.

**G**empa kuat yang berpusat di lepas pantai Filipina selatan itu tidak hanya menimbulkan kerusakan luas, tetapi juga memicu peringatan tsunami di sejumlah negara di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia, Taiwan, Papua Nugini, Palau, dan Jepang.

Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah Kota General Santos yang memiliki populasi sekitar 720 ribu

jiwa. Kota yang berada di utara pusat gempa tersebut mencatat sedikitnya sembilan korban meninggal dunia. Sementara di Kotamadya Glan, Provinsi Sarangani, sebanyak 14 warga dilaporkan tewas akibat longsor yang terjadi sesaat setelah gempa mengguncang.

Kepala Penanggulangan Bencana Provinsi Sarangani, Rene Punzalan, mengatakan banyak korban meninggal akibat material longsor

yang langsung menerjang permukiman warga usai gempa terjadi.

"Tanah longsor terjadi langsung setelah gempa bumi, sehingga banyak nyawa yang melayang," ujar Punzalan kepada AFP.

Ia menambahkan jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya menyampaikan laporan kondisi terkini.

## Tsunami di 3 Wilayah RI, BMKG Tetapkan 17 Daerah Siaga dan 13 Waspada

**BADAN** Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya kenaikan muka air laut di tiga wilayah Indonesia sebagai dampak dari gempa tersebut.

Dalam pembaruan peringatan dini yang dirilis pukul 07.40 WIB, BMKG menyatakan tsunami telah terdeteksi di beberapa titik pengamatan. BMKG menyebut, "Pemutakhiran peringatan dini, tsunami akibat gempa Mag: 7.7 (244 km Barat Laut Pulau Karatung Sulawesi Utara (Sulut)), telah terdeteksi di: Loloda-Halmahera Barat (07:20 WIB) 0,09 meter (m), Melonguane-Kepulauan Talaud (07:27 WIB) 0,19 m, Ulu Siau (07:27 WIB) 0,18 m."

Selain Indonesia, peringatan tsunami juga sempat diterbitkan untuk Filipina, Taiwan, dan Papua Nugini. Berdasarkan hasil

pemodelan BMKG, sebanyak 30 wilayah di Indonesia masuk dalam kategori terdampak potensi tsunami, terdiri dari 17 daerah berstatus siaga dan 13 daerah berstatus waspada.

BMKG menjelaskan bahwa status siaga mengharuskan pemerintah daerah segera mengambil langkah evakuasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah berpotensi terdampak. Dalam pedomannya disebutkan, status siaga berarti pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota "diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi."

Sedangkan untuk wilayah dengan

Analisis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Moh. Tahir Laendeng saat memantau titik gempa bumi dan peringatan potensi tsunami, Senin (8/6/2026).ant



status waspada, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan masyarakat di kawasan pesisir. BMKG menegaskan bahwa status waspada berarti pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota "diharapkan memperhatikan dan menjauhi pantai dan tepian sungai." (wid,rla,ant/dya)

Upaya pencarian dan evakuasi korban hingga Senin sore masih berlangsung di berbagai wilayah terdampak. Di General Santos, tim penyelamat terlihat menggali puing-puing bangunan sebuah jaringan toko kelontong untuk mengevakuasi dua pegawai yang masih tertimbun reruntuhan.

Proses penanganan bencana juga menghadapi berbagai kendala. Listrik dan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah terputus sehingga menyulitkan pendataan korban maupun koordinasi antartugas.

"Tantangan terbesar adalah komunikasi. Listrik padam, jadi sulit untuk mendapatkan informasi terbaru," kata Punzalan.

Kekhawatiran warga juga meningkat akibat rentetan gempa susulan yang terus terjadi. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, beberapa gempa susulan mengguncang wilayah yang sama sekitar dua jam setelah gempa utama, dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,5. (wid afp,ist/dya)

# Tips Tumbler Bersih, Aman dan Bebas Bau

**D**i tengah tren gaya hidup sehat dan kesadaran lingkungan yang terus meningkat, tumbler telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar wadah minum.

Anjuran untuk mengonsumsi setidaknya delapan gelas air putih setiap hari membuat banyak orang memilih membawa tumbler ke mana pun mereka pergi. Selain praktis, kebiasaan ini juga dianggap sebagai langkah kecil yang berdampak besar bagi lingkungan. Tak heran jika pasar tumbler berkembang pesat dengan beragam model, warna, hingga merek premium yang harganya bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.

Namun, memiliki tumbler yang menarik belum cukup. Faktor keamanan bahan dan cara perawatan menjadi aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Tumbler yang salah pilih atau kurang terawat bukan hanya mengurangi kenyamanan saat digunakan, tetapi juga berpotensi menjadi tempat berkembangnya bakteri dan menimbulkan bau tidak sedap.

Sebelum membeli tumbler, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah material pembuatnya. Tidak semua bahan memiliki karakteristik yang sama, baik dari segi keamanan, ketahanan, maupun kemudahan perawatan.

## Stainless Steel Tahan Lama

Salah satu jenis tumbler yang paling banyak digunakan adalah stainless steel. Material ini dikenal kuat, tahan karat, serta mudah dibersihkan. Banyak produk stainless steel modern juga dilengkapi teknologi isolasi dinding ganda yang mampu menjaga suhu minuman tetap panas atau dingin selama berjam-jam.

Menurut informasi dari Hackensack Meridian Health, stainless steel jenis SUS304 dan SUS316 termasuk material food grade yang aman bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman. Keunggulan inilah yang membuat tumbler stainless steel sering dibanderol lebih mahal dibandingkan bahan lainnya.

## Plastik Harus Bebas BPA

Tumbler plastik tetap menjadi pilihan populer karena ringan, kuat, dan relatif murah. Namun pengguna perlu lebih cermat memilih jenis plastik yang digunakan. National Institute of Environmental Health Sciences menjelaskan bahwa BPA atau

Bisphenol A merupakan bahan kimia industri yang digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat. Zat ini dapat larut ke dalam makanan atau minuman dan masuk ke dalam tubuh. Sejumlah penelitian menunjukkan paparan BPA berpotensi memengaruhi pertumbuhan sel, perkembangan janin, sistem reproduksi, serta fungsi hormonal karena kemampuannya meniru hormon estrogen.

Karena itu, pilihlah tumbler berbahan polypropylene (PP) atau Tritan yang bebas BPA. Plastik PP yang aman biasanya ditandai dengan kode angka 5 pada kemasannya. Kedua bahan tersebut mampu menahan suhu tinggi tanpa melepaskan senyawa berbahaya ke dalam minuman.

## Kaca Tak Menyerap Aroma

Bagi mereka yang mengutamakan kemurnian rasa minuman, tumbler kaca bisa menjadi pilihan menarik. Jenis kaca borosilikat dikenal tahan terhadap perubahan suhu dan benturan ringan sehingga risiko retak atau pecah lebih kecil.

Keunggulan lainnya, kaca tidak menyerap bau maupun rasa dari minuman sebelumnya. Material ini juga tidak bereaksi secara kimia dengan isi botol sehingga dianggap sangat aman. Meski demikian, bobotnya yang lebih berat dan risiko pecah tetap menjadi

pertimbangan tersendiri.

## Aluminium Ringan dan Praktis

Alternatif lain adalah tumbler berbahan aluminium. Berdasarkan informasi dari Water Bottle Advisor, material ini lebih ringan dan umumnya lebih murah dibandingkan stainless steel.

Meski cukup efektif menjaga minuman tetap dingin dalam waktu tertentu, aluminium tidak memiliki kemampuan isolasi panas sebaik stainless steel berdinding ganda. Selain itu, bahan ini dapat bereaksi dengan cairan yang bersifat asam, lebih mudah penyok saat terbentur, dan pada beberapa produk masih ditemukan lapisan plastik yang mengandung BPA.

## Silikon Fleksibel

Popularitas tumbler silikon meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pelancong dan pencinta aktivitas luar ruang. Material ini ringan, dapat dilipat, tahan panas, serta bebas BPA.

Saat membeli tumbler silikon, penting memastikan produk tersebut berlabel food-grade, food-safe silicone, atau telah memperoleh persetujuan dari FDA untuk menjamin keamanannya. Memilih bahan yang tepat hanyalah langkah awal. Perawatan harian memiliki peran

besar dalam menjaga tumbler tetap higienis.

Masalah yang paling sering dikeluhkan pengguna adalah munculnya bau tidak sedap setelah digunakan untuk kopi, teh, minuman manis, atau minuman berbau susu. Kondisi ini biasanya terjadi karena sisa cairan tertinggal terlalu lama dan menjadi tempat berkembangnya bakteri.

Cara paling sederhana untuk mencegahnya adalah mencuci tumbler segera setelah digunakan menggunakan sabun cuci piring dan air hangat. Air hangat membantu melarutkan sisa gula maupun lemak, sementara sabun membersihkan residu yang menempel pada permukaan bagian dalam.

Bagian yang sering terlupakan justru berada pada tutup botol dan karet penutupnya. Area tersebut mudah lembap dan menjadi lokasi favorit pertumbuhan bakteri penyebab bau.

Karena itu, semua komponen sebaiknya dilepas dan dibersihkan secara terpisah menggunakan sikat halus atau kapas agar tidak ada kotoran yang tertinggal di sela-sela kecil. (ist/dya)



# ROBOT HUMANOID DI CHINA WAJIB MILIKI 'KTP'

China mulai menerapkan sistem identitas nasional bagi robot humanoid untuk memantau aktivitas, mengelola risiko, sekaligus mendorong standarisasi industri robotika yang berkembang sangat cepat. Menurut laporan stasiun televisi pemerintah CCTV,).

Melalui sistem tersebut, otoritas dan produsen dapat mengawasi robot sejak didaftarkan hingga akhir masa operasionalnya. Langkah ini sejalan dengan upaya China mempercepat pemanfaatan robot humanoid secara komersial di berbagai sektor industri.

Wakil Kepala China Electronics Standardization Institute, Yu Xiuming, menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan keselamatan sekaligus tata kelola robot humanoid.

Setiap robot nantinya memperoleh nomor identitas unik yang terdiri atas empat komponen. Struktur identitas itu mencakup dua digit kode negara untuk melacak distribusi dan

penjualan, empat digit kode produsen, enam digit kode model produk, serta 17 digit nomor seri yang menjadi identitas spesifik masing-masing unit.

Sejumlah robot humanoid di Provinsi Hubei diperkirakan menjadi kelompok pertama yang menerima nomor identitas resmi tersebut. i.

Platform tersebut juga dapat merekam riwayat perawatan, skenario penggunaan, hingga performa robot sepanjang siklus hidupnya. Berbagai data real-time, seperti kondisi baterai, tingkat keausan sendi,

Direktur Bisnis perusahaan robotika Maxnova, Liu Jien.

Penerapan sistem identitas nasional ini terjadi ketika robot humanoid mulai digunakan secara nyata dalam kegiatan industri. Salah satu contohnya terlihat di fasilitas logistik Jianguo yang berada di bawah pusat pos Guangzhou,.

Di pusat logistik tersebut, robot humanoid bekerja berdampingan

dengan lengan robot otomatis dan forklift tanpa awak untuk menangani jutaan paket setiap hari.

Pusat logistik Guangzhou sendiri merupakan salah satu yang terbesar di China.

«Robot humanoid digunakan untuk mengambil paket dari kontainer dan meletakkannya ke jalur penyortiran. Sementara itu, forklift otonom bertugas memindahkan barang di area gudang.»

Berbeda dengan robot industri konvensional yang umumnya hanya dirancang untuk satu fungsi tertentu, robot humanoid dikembangkan agar dapat bekerja di lingkungan yang sebelumnya dirancang untuk manusia. Robot ini mampu bergerak di area gudang, mengenali paket, berinteraksi dengan rak penyimpanan.

Penggunaan robot humanoid juga menjadi bagian dari strategi nasional China untuk mempercepat pengembangan industri robotika. Dalam beberapa

Perusahaan-perusahaan China kini berlomba mengembangkan robot humanoid untuk berbagai kebutuhan, mulai dari manufaktur, logistik, layanan publik hingga perawatan lansia. Sektor logistik dianggap sebagai salah satu pasar paling menjanjikan karena volume pengiriman barang terus meningkat seiring pertumbuhan pesat perdagangan elektronik. Data industri menunjukkan dominasi China dalam pasar robot humanoid global. Berdasarkan laporan yang

diterbitkan Beijing CCID Publishing and Media bersama China Electronics News pada Maret 2026.

China menyumbang sekitar 14.400 unit atau 84,7 persen dari total pengiriman global. Sementara nilai pasar robot humanoid domestik China mencapai 1,55 miliar yuan atau setara 53,8 persen dari pasar global.

Meski berkembang pesat, industri robot humanoid China masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum seragamnya standar yang digunakan oleh banyak perusahaan robotika.

Efektivitas jangka panjang teknologi ini juga masih terus diuji, terutama jika dibandingkan dengan sistem otomatisasi yang lebih sederhana dan telah lama digunakan. Namun keputusan China menerapkan robot humanoid di fasilitas yang menangani jutaan paket per hari menunjukkan bahwa teknologi tersebut mulai dipandang sebagai alat kerja nyata, bukan lagi sekadar konsep masa depan.

"Dalam insiden keselamatan atau potensi bahaya data, nomor ID dapat mendukung pelacakan yang cepat serta penegakan terkait siapa yang harus bertanggung jawab.

Dengan kata lain, "KTP robot" yang mulai diterapkan China bukan sekadar instrumen registrasi.

Sistem tersebut menjadi fondasi pengawasan industri robot humanoid yang kini telah memasuki tahap penggunaan komersial di dunia nyata, dari pabrik hingga pusat logistik berskala jutaan paket per hari. (ist/dya) (Desain : Rama Mahasiswa Unesa)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
**PIMPINAN PERUSAHAAN** TARMUJI TALMACSI  
**OMBUDSMAN** SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
**PENANGGUNG JAWAB** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**PIMPINAN REDAKSI** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**REDAKTUR PELAKSANA** AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
**REDAKTUR** LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

**KORAN DIGITAL LENTERA TODAY**  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS**  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

**MEDIA TERVERIFIKASI**

# Toner dan Essence Sering Dianggap Sama, Padahal Fungsinya Berbeda

**D**i tengah semakin banyaknya produk perawatan kulit yang tersedia di pasaran, toner dan essence menjadi dua produk yang paling sering membuat pengguna skincare bingung. Keduanya sama-sama berbentuk cair, digunakan setelah mencuci wajah, dan sekilas tampak memiliki fungsi yang serupa. Tak sedikit orang yang bahkan menganggap toner dan essence dapat saling menggantikan.

Padahal, para ahli kulit menegaskan bahwa kedua produk tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam rutinitas perawatan wajah. Memahami perbedaan toner dan essence menjadi penting agar setiap produk yang digunakan dapat bekerja secara optimal dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan kulit. Toner merupakan produk yang digunakan segera setelah wajah dibersihkan.

Fungsi utamanya adalah membantu mengangkat sisa kotoran yang mungkin masih tertinggal setelah proses mencuci wajah, sekaligus mengembalikan keseimbangan kondisi kulit.

Dermatolog bersertifikat asal Miami, Dr. Anna Chacon, menjelaskan bahwa toner berfungsi membersihkan sisa kotoran, menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH kulit, serta mempersiapkan kulit agar lebih siap menerima produk perawatan berikutnya.

Hal serupa juga disampaikan dermatolog Dr. Purvisha Patel. Menurutnya, toner memiliki tekstur yang umumnya lebih encer dibandingkan essence dan digunakan sebagai langkah kedua setelah pembersih wajah. Dengan kondisi kulit yang sudah bersih dan seimbang, produk skincare yang digunakan setelahnya dapat terserap lebih baik.

Peran toner sendiri telah berkembang cukup jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. Jika dulu toner identik dengan kandungan alkohol yang berfungsi mengurangi minyak berlebih pada wajah, kini banyak toner diformulasikan untuk kebutuhan yang lebih beragam. Ada toner yang berfungsi melembapkan kulit, menenangkan kemerahan, membantu mencerahkan wajah, hingga mendukung proses eksfoliasi ringan.

Beberapa toner modern bahkan diperkaya kandungan bahan aktif seperti AHA, BHA, dan PHA yang mampu membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut. Karena itu, produk ini sering direkomendasikan bagi pemilik kulit berminyak, rentan berjerawat, atau yang memiliki masalah pori-pori tersumbat.

Sementara itu, essence memiliki fungsi yang berbeda. Produk yang populer berkat tren kecantikan Korea dan Jepang ini lebih berfokus pada hidrasi dan perawatan kulit secara mendalam. Essence dirancang untuk memberikan kelembapan tambahan sekaligus membantu produk perawatan berikutnya bekerja lebih efektif.

Ahli kecantikan sekaligus pendiri Refinery4 di New York, Samantha Susca, menjelaskan bahwa essence berfungsi menghidrasi kembali lapisan permukaan kulit dan mempersiapkan kulit agar serum maupun krim yang digunakan setelahnya dapat meresap secara optimal. Berbeda dengan toner yang lebih berorientasi pada tahap persiapan kulit, essence bekerja sebagai produk treatment yang memberikan manfaat perawatan tambahan.

Keunggulan essence terletak pada ukuran molekulnya yang relatif lebih kecil dibandingkan sejumlah produk perawatan lainnya seperti serum dan pelembap. Karena itu, bahan aktif di dalam essence dapat menembus lapisan kulit dengan lebih efektif. Berbagai kandungan yang umum ditemukan dalam essence antara lain hyaluronic acid yang

berfungsi menjaga kelembapan, niacinamide untuk membantu mencerahkan kulit, gliserin yang berperan sebagai humektan, probiotik untuk mendukung kesehatan skin barrier, hingga berbagai antioksidan dan ekstrak tumbuhan yang membantu melindungi kulit dari pengaruh lingkungan.

Dermatolog Dr. Morayo Adisa merangkum perbedaan kedua produk tersebut secara sederhana. Menurutnya, toner berfungsi membersihkan dan mempersiapkan kulit, sedangkan essence merupakan perawatan yang lebih terkonsentrasi untuk menjawab kebutuhan kulit secara spesifik.

Perbedaan keduanya juga dapat dilihat dari tekstur dan manfaatnya. Toner biasanya sangat ringan dan encer seperti air, sedangkan essence sedikit lebih kental meski tetap terasa ringan saat diaplikasikan. Dari sisi manfaat, toner lebih fokus pada pembersihan, keseimbangan pH, kontrol minyak, dan persiapan kulit. Sebaliknya, essence lebih menitikberatkan pada hidrasi, perbaikan skin barrier, serta membantu penyerapan produk skincare yang digunakan setelahnya.

Meski sama-sama digunakan setelah mencuci wajah, urutan pemakaiannya tidak boleh tertukar. Dermatolog Dr. Stacy Chimenot menegaskan bahwa toner harus diaplikasikan terlebih dahulu sebelum essence. Jika urutannya dibalik, toner berpotensi mengangkat kembali bahan aktif yang sudah diberikan oleh essence sehingga manfaatnya tidak dapat bekerja secara maksimal.

Secara umum, urutan perawatan kulit yang paling banyak direkomendasikan adalah dimulai dari pembersih wajah, kemudian toner, dilanjutkan essence, serum, pelembap, dan diakhiri dengan sunscreen pada pagi hari. (ist/dya)



## Perbedaan dari sisi manfaat

| Toner                                                                                                                                                                                                                                                                | Essence                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rekomendasi Urutan Skincare                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membersihkan residu yang tertinggal.</li> <li>- Menyeimbangkan pH kulit.</li> <li>- Mengontrol minyak berlebih.</li> <li>- Membantu eksfoliasi ringan.</li> <li>- Menyiapkan kulit menerima skincare berikutnya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah hidrasi.</li> <li>- Memperbaiki skin barrier.</li> <li>- Membantu penyerapan serum dan pelembap.</li> <li>- Mengantarkan bahan aktif ke lapisan kulit.</li> <li>- Mendukung kesehatan kulit jangka panjang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facial cleanser.</li> <li>- Toner.</li> <li>- Essence</li> <li>- Serum.</li> <li>- Pelembap.</li> <li>- Sunscreen pada pagi hari.</li> </ul> |

**Simpang Siur Dapur Gizi ...dari hal 1**

**B**eberapa hari lalu, kabar sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti beroperasi dibantah. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut informasi mengenai penghentian penyaluran dana program sebagai kabar yang tidak benar. Namun, awal pekan ini memperlihatkan kenyataan yang lebih rumit.

Sejak Senin (8/6/2026), media sosial dipenuhi pengumuman penghentian sementara operasional dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Surat pemberitahuan beredar dari berbagai daerah. Sebagian diunggah langsung oleh pengelola dapur. Sebagian lain tersebar melalui akun media sosial mitra program.

Pada hari yang sama Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, mengakui memang terjadi keterlambatan pencairan dana operasional. Namun ia menegaskan persoalan tersebut hanya bersifat teknis. Di saat bersamaan, laporan mengenai dapur-dapur yang berhenti beroperasi terus bermunculan dari berbagai daerah.

Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan berasal dari akun Threads @diyongputraandri. Akun itu menampilkan sejumlah surat resmi dari SPPG yang mengumumkan penghentian sementara layanan mulai 8 Juni 2026.

"Lagi rame guys, SPPG dari beberapa daerah menginfokan bahwa program MBG distop sementara mulai Senin besok 8 Juni 2026. Infonya ada kendala terkait dana operasional, artinya belum ada payment dari BGN ke beberapa SPPG tersebut," tulis akun tersebut.

Dalam unggahan yang sama muncul pula spekulasi bahwa jumlah SPPG akan dikurangi untuk menekan kebutuhan anggaran. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi BGN yang mengonfirmasi klaim tersebut.

Yang pasti, penghentian operasional memang terjadi di sejumlah daerah.

Di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 195 dapur MBG atau SPPG berhenti beroperasi sementara. Dampaknya dirasakan oleh ratusan ribu penerima manfaat yang tidak memperoleh distribusi makanan seperti biasanya. Kepala BGN Regional NTB, Eko Prasetyo, membenarkan kondisi tersebut.

"Jadi memang tidak operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Hari ini ada pencairan lagi, nanti berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi, nanti akan segera, kami optimalkan semua," kata Eko.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan proses pencairan dana dari pusat. Data SPPG terlebih dahulu ditarik dari sistem sebelum dana ditransfer secara bertahap.

Hingga awal pekan ini masih banyak dapur yang belum menerima dana operasional.

"Itu belum ada komunikasi sih dari pusat ya, itu dananya pusat itu, kalau terkait dananya. Tetapi, kali ini kendala teknis saja, biasa," ujarnya.

Eko juga membantah anggapan bahwa persoalan ini berkaitan dengan pergantian pimpinan di tubuh BGN.

"Ini beda konteks. Konteks permasalahan ini kendala teknis. Tidak ada hubungan terkait pergantian ke pucuk pimpinan," katanya.

Gangguan serupa terjadi di Jawa Tengah. Di Kabupaten Karanganyar, sedikitnya 30 SPPG menghentikan operasional pada Senin. Sejumlah dapur yang biasanya sibuk menyiapkan ribuan porsi makanan tampak kosong tanpa aktivitas memasak.

Koordinator BGN Karanganyar, Rifky Sheva Al Ghifary, mengatakan hampir seluruh dapur yang berhenti mengalami masalah yang sama.

"Rata-rata hampir semua terkendala pencairan dana. Itu biasanya memang seperti itu pencairan agak terlambat," ujarnya.

Menurut Rifky, informasi yang diterimanya menyebut sebagian dana mulai dicairkan pada Senin pagi sehingga operasional dapur

diharapkan bisa segera pulih.

"Per hari ini 30 (SPPG), tersebar di masing-masing kecamatan. Cuma infonya pagi ini ada pencairan tapi belum saya update lagi," katanya.

Ia optimistis dapur dapat kembali beroperasi setelah dana masuk ke rekening operasional.

"Itu hal biasa di sistem. Yang pasti nanti di hari ini juga, Senin ini juga infonya sudah ada pencairan. Kalau besok bisa operasional, besok bisa operasional lagi," ujarnya.

Laporan serupa datang dari berbagai daerah lain. Di Aceh Besar, 27 SPPG dilaporkan berhenti beroperasi karena dana virtual account belum masuk. Di Solo, sejumlah dapur MBG juga sempat menghentikan layanan. Informasi penghentian sementara turut muncul dari Serang, Lebak, Pandeglang, Cirebon, Bangkalan, Batam, Magelang hingga Banda Aceh.

Persoalan menjadi semakin pelik karena pengelola dapur tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan. Eko Prasetyo menegaskan bahwa mitra SPPG tidak boleh mencari pinjaman ataupun menggunakan sistem pembayaran tempo untuk menutup kebutuhan operasional.

"Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Tidak diperkenankan," kata dia.

Akibatnya, ketika dana operasional terlambat masuk, sebagian pengelola memilih menghentikan sementara kegiatan produksi dibanding menanggung risiko keuangan yang lebih besar.

Di tengah derasnya laporan dari lapangan, Nanik memberikan penjelasan berbeda dari narasi yang berkembang sebelumnya. Ia tidak membantah seluruh informasi yang beredar.

"Ada sebagian dari hoaks," kata Nanik usai pelantikan di Istana Merdeka, Senin. (gus ist,rls,kum/dya)

**DATA PENGAWASAN  
DAPUR MBG**

Total SPPG beroperasi (29 Mei 2026)

**27.208 unit**

SPPG yang pernah ditangguhkan

**8.182 unit**

SPPG kembali beroperasi:

**5.659 unit**

SPPG masih ditangguhkan

**2.213 unit**

## Sekolah Mapan Berpotensi Dicoret dari Program

**PEMERINTAH** mulai mengevaluasi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, menyatakan akan melakukan refocusing atau penajaman penerima manfaat agar bantuan negara lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Pernyataan itu disampaikan Nanik usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Menurut dia, sekolah-sekolah swasta yang berasal dari kalangan ekonomi menengah atas perlu dikaji ulang apakah masih layak menjadi penerima manfaat MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus," kata Nanik kepada wartawan.

Ia menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran negara difokuskan kepada

anak-anak yang memang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Karena itu, BGN akan menelaah kembali jumlah penerima manfaat yang selama ini menjadi target program.

"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," ujarnya.

Nanik mengatakan angka penerima manfaat yang selama ini diproyeksikan mencapai 63 juta orang juga akan ditinjau ulang. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan apakah seluruh target tersebut benar-benar membutuhkan bantuan atau justru terdapat kelompok yang dapat dialihkan sehingga cakupan program bisa diperluas kepada masyarakat yang belum tersentuh.

"Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," tuturnya.

Selain mengevaluasi penerima manfaat, Nanik juga menegaskan akan mengubah fokus kerja BGN dari ekspansi menjadi pembenahan kualitas pelaksanaan program. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan maupun pendaftaran dapur baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Nanik, tugas pertama yang akan dijalankannya setelah memimpin BGN adalah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

"Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," katanya.

Ia menjelaskan efisiensi dilakukan melalui kebijakan moratorium terhadap titik layanan baru dan pembangunan dapur baru. Pemerintah akan terlebih dahulu menata jaringan yang sudah ada sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut. (gus ist,rls/dya)

# BUPATI MUARA ENIM KENA OTT, KPK SITA UANG RATUSAN JUTA RUPIAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, pada Senin (8/6/2026). Selain mengamankan barang bukti berupa uang, KPK juga menangkap total 10 orang yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

**J**uru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa tim di lapangan masih bergerak aktif untuk melacak Silmy Karim. Terkait hal ini, KPK mengeluarkan seruan tegas agar Silmy segera menyerahkan diri ke gedung Merah Putih demi kelancaran proses hukum. Menurut Budi, keterangan dari Wakil Menteri sangat dibutuhkan untuk mengurai benang merah perkara yang sedang diusut. "Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Rabu (3/6).

KPK mengindikasikan bahwa posisi Silmy terdeteksi tidak jauh dari pusat pemerintahan. "Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami



KPK menyegel ruang kerja Bupati Muara Enim. Foto: Dok. Istimewa

mengimbuu agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," tambah Budi saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Pihak lembaga antirasuah pun masih mendalami sejauh mana peran dan keterlibatan Silmy dalam pusaran kasus ini. "Kita masih akan menelusuri terkait dengan informasi itu, sehingga tim tentunya kemudian

## Sebelum Ditangkap, Edison Masih Pimpin Apel Pegawai



Bupati Muara Enim Edison sempat memimpin apel gabungan lingkup Pemkab Muara Enim di halaman Kantor Bupati Muara Enim Senin (8/6/2026) pagi. (ist)

**BEBERAPA** jam sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Muara Enim Edison masih menjalankan aktivitas pemerintahan seperti biasa. Pada Senin pagi (8/6/2026), ia bahkan memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Muara Enim dan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah aparatur sipil negara berprestasi.

Momen tersebut terekam dalam unggahan resmi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Namun suasana berubah drastis hanya

beberapa jam kemudian ketika KPK melakukan operasi senyap yang berujung pada penangkapan Edison.

Di tengah kasus yang kini menjadi sorotan nasional, profil dan kekayaan Edison turut menarik perhatian. Politikus Partai NasDem itu lahir di Banuayu, Muara Enim, pada 6 Maret

1968. Ia mengawali pendidikan di SDN 1 Banuayu, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Lubuklinggau dan SMAN 1 Lubuklinggau.

Edison kemudian meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada 1992. Pendidikan pascasarjana diselesaikannya di Universitas Sriwijaya pada 2002.

Sebelum menjadi kepala daerah, Edison berkarier cukup lama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mulai bertugas sejak 1995 dan jabatan terakhirnya adalah Kepala Bidang

Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan.

Karier politiknya mengantarkan Edison memenangkan Pilkada Muara Enim 2024 bersama Sumarni dari PDI Perjuangan. Pasangan tersebut meraih 114.258 suara atau 38,76 persen suara sah dan resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada 20 Februari 2025.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 27 Maret 2026 untuk periode tahun 2025, Edison memiliki total kekayaan sebesar Rp16.030.192.000.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp14.180.192.000 yang tersebar di Palembang, Prabumulih, dan Banyuasin. Ia tercatat memiliki delapan bidang tanah dan bangunan di sejumlah daerah tersebut.

Selain aset properti, Edison memiliki dua kendaraan, yakni Toyota Alphard tahun 2010 dan Toyota Fortuner tahun 2019 dengan total nilai Rp505 juta. (tin,ist/dya)

### 4 BUPATI MUARA ENIM TERSANDUNG KORUPSI

**Muzakir Sai Sohar (2014-2018)**

- Tersangka: 12 November 2020
- Kasus proyek fiktif alih fungsi lahan
- Kerugian negara Rp5,8 miliar
- Divonis 8 tahun penjara

**Ahmad Yani (2018-2019)**

- OTT KPK: 2 September 2019
- Suap 16 proyek PUPR Muara Enim
- Terima suap Rp3,1 miliar
- Divonis 7 tahun penjara

**Juarsah (Bupati pengganti Ahmad Yani)**

- Terlibat kasus suap proyek PUPR
- Terima aliran dana Rp2,5 miliar
- Divonis 4,5 tahun penjara

**Edison (2025-2030)**

- OTT KPK: 8 Juni 2026
- Diduga terkait proyek pengadaan Pemkab Muara Enim
- 10 orang diamankan, termasuk Edison
- KPK masih mendalami kasusnya

membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga mengimbuu agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," tegas Budi.

Dugaan tindak pidana yang dilakukan Wakil Menteri Silmy Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2023-2024.

Silmy dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023 dan berakhir pada 21 Oktober 2024, seiring pelantikannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Wamen Imipas). "Dirjen Imigrasi 2023-2024," ujarnya.

Budi belum bisa menyampaikan informasi perihal Pasal yang akan digunakan terhadap para pihak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali pada 2 hingga 3 Juni 2026. (wid,ist,rls/dya)